

## BPK Soroti Penanganan TKI dan Haji

SBY Tindak Lanjuti dengan Tim Terpadu

JAKARTA—Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pelaksanaan ibadah haji mendapatkan sorotan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan menindaklanjuti temuan BPK atas dua hal tersebut untuk meningkatkan pengelolaan TKI dan ibadah haji sehingga menjadi lebih baik.

"Saya berterima kasih karena pengelolaan dua hal yang menjadi agenda dan isu utama pemerintah dari tahun ke tahun itu ingin kami tingkatkan sehingga lebih baik," kata SBY dalam keterangan pers setelah menerima Ketua BPK Hadi Purnomo dan anggotanya di Kantor Presiden kemarin (11/4).

BPK menemui presiden untuk menyampaikan hasil pemeriksaan atas penggunaan anggaran semester kedua 2010. Menurut SBY, BPK melihat bahwa beberapa hal tentang penanganan TKI harus diperbaiki dan dikoreksi. Dari temuan BPK dan hasil evaluasi pe-

merintah, SBY mengatakan akan menentukan langkah lanjutan, yakni membentuk tim terpadu untuk melakukan investigasi.

"Investigasi dalam arti yang longgar. Apa yang dilakukan agen-agen pengiriman TKI di dalam negeri maupun apa yang dilakukan agen di luar negeri atau pemerintah setempat terhadap saudara-saudara di luar negeri," papar SBY.

Jika lembaga maupun pemerintah negara tertentu tidak layak atau tidak memenuhi syarat dalam perlindungan TKI, SBY akan mengambil langkah moratorium. "(Moratorium atau penundaan sementara) sampai semua siap, sampai TKI bisa bekerja dengan baik," papar dia.

Bahkan, lanjut SBY, jika upaya percepatan dan pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur kredit usaha rakyat (KUR), makin besar, TKI punya pilihan untuk bekerja di dalam atau luar negeri. "Beberapa negara dinilai cukup baik, beberapa dinilai kurang baik.

Termasuk, anggaran yang digunakan perwakilan di negara sahabat yang mengurus TKI," jelasnya.

SBY menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan BPK, apakah itu penyimpangan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atau kesalahan administrasi.

Saat menerima BPK, SBY menuturkan juga membahas efisiensi dan optimalisasi anggaran negara. Menurut dia, BPK melakukan pengawasan dan berfokus pada badan-badan usaha milik negara, termasuk perbankan. "(Sehingga) itu terjadi optimalisasi penerimaan negara yang benar. Tidak terjadi efisiensi dan hal-hal yang bertentangan dengan itu," terang dia.

SBY mencontohkan usaha batu bara yang harus memenuhi standar lingkungan dan bermanfaat bagi rakyat. "Negara juga mendapatkan penerimaan patut dari apa yang katakanlah usaha yang booming," ucapnya. (fal/c11/agm)